

RENCANA KERJA PD (RENJA)

Tahun Anggaran 2020



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl. Soekarno Hatta No.171 Telp. 0374 – 7000027

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunianya dan kekuasaannya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2020. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang beberapa program dan kegiatan yang telah kami kerjakan dan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi secara nyata. Laporan ini juga menyajikan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dimaksudkan sebagai acuan untuk kami dalam merencanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sebaik-baiknya dan seoptimal mungkin untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Kota Bima, Oktober 2019

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bima,

DIDI FAHDIANSYAH, ST., MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19740910200210 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Sistematisasi Penyusunan	15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	22
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	26
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja	26
3.2. Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kota/Kabupaten) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penterjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana kerja ini bersifat dinamis, dengan kata lain akan diadakan evaluasi dan penyesuaian didasarkan pada perkembangan hasil pelaksanaannya, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka koordinasi horizontal dan vertikal terus ditingkatkan, mengingat Rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacar Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;

17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015, dan memberikan arah dalam penyusunan rencana pembiayaan yang menggambarkan rencana pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Bima. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai tolak ukur dalam perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima terdiri atas :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat

Sekretaris membawahi berbagai Sub yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

Melakukan urusanpersuratan,urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- g. Penyusunan laporan kegiatan SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencanan kerja, program dan kegiatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- f. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan kerjasama;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil perencanaan;
- i. Pelaksanaan urusan keuangan;
- j. Pelaksanaan urusan akutansi, verifikasi keuangan;
- k. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- l. Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasansesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pembinaan di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas di atas, Bidang Perumahan Rakyat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kegiatan operasional dan program di bidang perumahan rakyat.
2. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan perumahan formal dan perumahan swadaya, pemeliharaan prasarana dan sarana dan utilitas perumahan dan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (Rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
3. Pembinaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, lembaga keuangan dan lembaga pendukung perumahan dalam pembangunan perumahan formal dan swadaya.
4. Pengaturan pelaksanaan penyusunan rencana penataan perumahan
5. Pengaturan, penelitian, pembinaan izin dan rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan\
6. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

1) Seksi Perencanaan Perumahan;

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengorganisasian dan perencanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perencanaan perumahan
- b) penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan mengacu pada SPM nasional

- c) pengumpulan inventarisir data-data di bidang perumahan
- d) pengelolaan data base bidang perumahan meliputi data rumah layak huni, harga rumah layak huni dan besaran penghasilan rumah tangga
- e) pelaksanaan pelayanan informasi bidang perumahan
- f) penyusunan skala prioritas pembangunan perumahan
- g) penyusunan standar teknik pembangunan perumahan
- h) penyusunan pola-pola dan konsep pembangunan dan perumahan yang meliputi aspek social, aspek fisik, ekonomi dan budaya
- i) pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan fasilitas penyedia rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya bagi MBR
- j) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penyedia perumahan, meneliti dan memproses persyaratan administrasi teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan rakyat
- k) perencanaan tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata lingkungan
- l) pemberian pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan rencana perumahan
- m) penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang perumahan
- n) penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di tingkat penyelenggaraan perumahan
- o) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hokum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil
- p) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumaha, dan
- q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Perumahan Formal;

Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan Formal

mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan formal
- b) penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan secara terorganisir oleh sebuah institusi formal
- c) pelaksanaan penyediaan, fasilitasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan formal
- d) menerbitkan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- e) penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)
- f) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- g) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan formal
- h) pelaksanaan pencegahan timbulnya perumahan kumuh
- i) pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus
- j) pelaksanaan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan (BUMN, BUMD, Koperasi, perorangan dan swasta)
- k) fasilitasi dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi
- l) fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) untuk MBR dan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitasnya
- m) fasilitasi pembangunan perumahan bagi PNS dengan harga terjangkau, rumah untuk korban bencana, perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan
- n) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- o) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan perumahan, dan
- p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Perumahan Swadaya;

Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang perumahan formal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan

Swadaya mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan swadaya
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembiayaan perumahan swadaya
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan system pembiayaan perumahan swadaya
- d) penyiapan bahan koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan rumah swadaya
- e) fasilitasi bantuan pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan perumahan bagi MBR
- f) fasilitasi pembiayaan dan stimulant pembangunan prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan swadaya
- g) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- h) pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
- i) penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan rumah swadaya
- j) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
- k) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
- l) fasilitasi pembangunan rumah contoh rumah sehat sederhana (RSH) sebagai stimulant
- m) fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan swadaya
- n) pelaksanaan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga keuangan mikro non bank (LKNB) dalam mempermudah akses untuk mendapatkan stimulant pembangunan dan perbaikan rumah bagi MBR
- o) pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendukung perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
- p) evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan swadaya, dan

q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengoordinasian penyelenggaraan di bidang kawasan permukiman dan pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana strategis bidang sesuai rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi dinas
- b. Perumusan dan penyusunan rencana strategis bidang
- c. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- e. Pengoordinasian perencanaan teknis di bidang pengelolaan pengembangan kawasan
- f. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman dan pertanahan
- g. Pelaporan dan pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan permukiman dan pertanahan
- h. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

1) Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;

Seksi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan kawasan Permukiman Kumuh mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penataan Kawasan Permukiman Kumuh
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategi penataan kawasan permukiman kumuh
- c) penyusunan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- d) pelaksanaan perencanaan program dan anggaran di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- e) pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
- f) pelaksanaan kebijakan di bidang penataan kawasan permukiman kumuh
- g) penyusunan kebijakan dan strategis serta NSPK kasiba/lisiba
- h) penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh
- i) rekomendasi dalam perizinan kasiba/lisiba
- j) pelayanan informasi penyelenggaraan penataan kawasan permukiman kumuh
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman, strategi dan skala besar
- b) fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba
- c) pengendalian kawasan permukiman

- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengendalian dan pengembangan kawasan permukiman
- e) pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba dan lisiba
- f) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
- g) pengelolaan dan pemanfaatan kawasan khusus, strategis dan skala besar, dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan di bidang Pertanahan

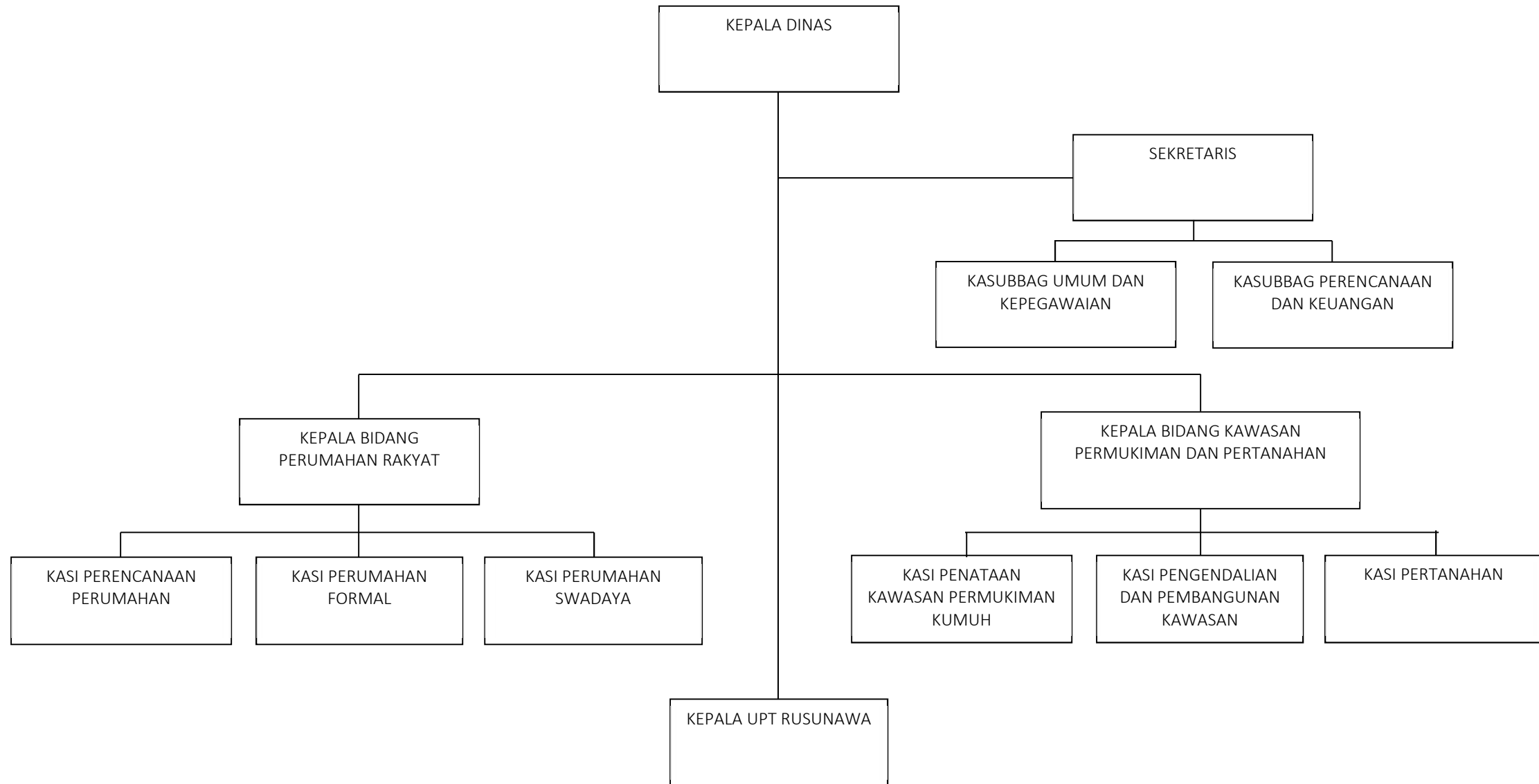
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertanahan mempunyai fungsi

- a) penyusunan rencana dan program dan kegiatan di bidang Pertanahan
- b) penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis
- c) pelaksanaan anggaran kegiatan
- d) fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum retribusi tanah, ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum, inventarisasi tanah bangunan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pebantuan, fasilitasi mitigasi/pencegahan bencana dan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan linmas serta penegakan HAM
- e) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya
- f) fasilitasi persyaratan pemberian izin lokasi dan peninjauan lokasi tanah serta permohonan izin membuka tanah, fasilitas penunjukan lahan dan pengembangan, pemeriksaan lapangan berdasarkan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengusulan Camat sebagai PPAT sementara dan pembinaan administrasi pertanahan, dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERPRAJA KOTA BIMA



1.5. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2020 disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD , memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, tantangan dan peluang serta

formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018

Evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak kegiatan-kegiatan dalam program sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistematis dan obyektif. Pengklasifikasian dilaksanakan yakni sebelum berlangsung (*ex ante*), pada saat berlangsung (*on going*), atau sesudah selesai (*ex post*). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai dan kegagalan yang dihadapi terhadap pelaksanaan dari suatu kegiatan. Parameter yang digunakan sebagai pembandingan dalam melaksanakan evaluasi kinerja adalah kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya dan atau dengan kinerja lainnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan OPD baru

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2018
KOTA BIMA

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BIMA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra SKPD) Thn.2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Progra dan Keluara Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD) s/d Tahun 2019	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	Urusan Wajib									
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.04.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerjasama dengan media	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Kegiatan makan minum rapat	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun baru (Sekretariat Fasilitator)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai Yang Memperoleh Hukuman Disiplin	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.03.05	Pengadaan pakaian khusus haris-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.01	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semester	Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.04.1.06.04	Penyusunanpelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.1.06.06	Penyusunan LKIP, LPJ dan LPPD SKPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.18	Programperbaikan perumahan akibat bencana alam /sosial	Prosentase jumlah rumah tidak layak huni akibat bencana alam/social yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.1.18.09	Pendataan Perumahan dan Permukiman	Jumlah data perumahan yang ter-update	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.18	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dan porsentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.18.01	Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan	Jumlah dokumen	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.18.06	Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
.04.01.0115	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dan porsentase jumlah kekurangan rumah yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.09	Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya	Jumlah Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.11	Pendataan Perumahan	Jumlah data perumahan yang terupdate	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.12	Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa	- Jumlah penghuni rusunawa - Pembangunan pagar rusunawa (bagian	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		depan/barat)								
1.04.01.0115	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase jumlah PSU perumahan yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.15.09	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat	Jumlah dokumen PSU yang diserahkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.0116	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase luas asset tanah pemerintah yang diadakan dan persentase jumlah sertifikat asset tanah pemerintah untuk kepentingan umum	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.16.03	Pembebasan/Pengadaan Tanah	- Luas tanah yang diadakan/dibebaskan - Jumlah sertifikat asset tanah pemerintah yang diterbitkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.0117	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Porsentase Jumlah Koordinasi Pokja PKP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.17.10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (pokja)	Jumlah Rekomendasi/kebijakan dibidang perumahan			100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.0117	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Persentase Jumlah Konflik-konflik Pertanahan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.17.01	Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Konflik Pertanahan yang ditangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.0121	Program Perencanaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.04.01.01.22.01	Rencana Teknis kawasan permukiman kumuh	Jumlah Dokumen kawasan permukiman kumuh	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 19.107.874.500,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.904.503.500,- dan Belanja Langsung Rp. 17.203.371.000,- terurai dalam 12 program dan 35 kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

➤ Hambatan dan Permasalahan :

- a. Kualitas SDM masih harus ditingkatkan.
- b. Jumlah Personil/PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ideal, akibatnya pelaksanaan tugas berjalan kurang optimal. Idealnya untuk Kota Bima dengan kompleksitas masalah dan jumlah penduduk serta luas wilayah minimal harus memiliki 2 staf untk masing-masing eselon IV.
- d. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menghambat monitoring dan evaluasi lapangan

➤ Upaya Pencegahan Masalah :

- a. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan merencanakan serta menganggarkan;

- b. Meningkatkan jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dan meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan pembinaan pegawai, baik yang diselenggarakan internal maupun bekerjasama dengan instansi terkait;
- c. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD dalam sosialisasi perundang-undangan daerah yang terkait langsung dengan program SKPD yang bersangkutan dan menambah jumlah PNS yang memiliki kualifikasi dengan mengirim PNS untuk ikut Diklat PNS;
- d. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas monitoring, walaupun hanya kendaraan roda 2.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018 adalah ***“Terwujudnya kondisi daerah dan masyarakat Kota Bima yang aman, tenteram, tertib dan teratur”*** selanjutnya ditetapkan sasaran dan tujuan pembangunan. Dalam mewujudkan Visi, sasaran serta tujuan pembangunan tersebut maka harus diperlukan suasana yang aman, tenteram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat.

Agar dapat memberikan rasa aman, tenteram dan kondusif ditengah-tengah masyarakat yang optimal baik secara ekonomis, sosial dan ekologi termasuk peranannya bagi Pemerintah Daerah diperlukan pengawalan dan penegakan dalam Pelaksanaan Perda/Perwal Kota Bima.

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan dimaksud maka Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sebagaimana yang tercantum dalam RENSTRA Tahun 2013-2018 mengacu pada Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, adalah sebagai berikut :

- A. **VISI** : ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan”***
- B. **MISI** :
 - 1. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman
 - 2. Meningkatkan penanganan pertanahan pemerintah untuk kepentingan umum

2.2.1 Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima adalah :

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih kurang.
2. Kualitas Sumber Daya Aparatur masih rendah.
3. Masih adanya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah.
4. Adanya Kawasan Kumuh.
5. Konflik-konflik akibat pengadaan tanah.

2.2.2 Rekomendasi dan Catatan Strategis

1. Jumlah PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional. Untuk itu perlu ditingkatkan kapasitas PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, sehingga diharapkan jumlah PNS yang ideal. Kebijakan ini dilakukan guna menunjang tugas fungsi serta operasional dan penegakan Perda dan Perwali sejalan dengan perkembangan pembangunan.
2. Sumber Daya Aparatur merupakan unsur penentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur sebagai satu kebutuhan dasar merupakan bagian usaha dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima. Kondisi relatif masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima tercermin dari tingkat kemampuan dalam kajian dan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya yang terkait dengan tugas-tugas teknis penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
3. Pengentasan kemiskinan dengan pola Perbaikan kualitas hidup, khususnya pada ketidak layakan hunian.
4. Fokus pada kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM), RTLH dan tingkat kekumuhan tinggi.

5. memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan
6. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain:
 - a. Meningkatkan Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. Mengurangi kawasan kumuh
 - c. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan pengadaan tanah
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya, diantaranya dengan membentuk PokJa PKP Kota Bima sehingga memberikan peran dalam menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan Dan Sasaran

Renja merupakan pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan Perangkat Daerah secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023. Yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas Rumah Layak Huni.
- 2) Peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Tabel 3.1.1.

Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2019 sd 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal (Thn 2018)	Kondisi Akhir (Thn 2023)
1	Peningkatan kualitas Rumah Layak Huni	Persentase Rumah layak huni	90,18%	100%
2.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh	14,05%	6,32%

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

- 1) Meningkatnya Rumah Layak Huni.
- 2) Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

Tabel 3.1.2

Sasaran, indikator Sasaran di Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (Thn 2019)
1	Meningkatnya Rumah Layak Huni	Porsentase Rumah Layak Huni	94,88%
2.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh Tertangani	10,28%

3.2. Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan. Pada tahun 2020. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1	04	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bima	100%	932.479.000	APBD		100%	992.479.000
1	04	01	01				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Kota Bima	500 Exp.	19.200.000	APBD		500 Exp.	19.200.000
1	04	01	01	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				19.200.000	APBD			
1	04	01	01	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				19.200.000	APBD			
1	04	01	01	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				19.200.000	APBD			
1	04	01	02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan jasa terselesaikan	Kota Bima	12 Bln	83.920.000	APBD		12 Bln	83.920.000
1	04	01	02	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				83.920.000	APBD			
1	04	01	02	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				83.920.000	APBD			
1	04	01	02	5.2.2	03	01	Belanja Telepon				28.800.000	APBD			
1	04	01	02	5.2.2	03	03	Belanja Listrik				42.000.000	APBD			
1	04	01	02	5.2.2	03	05	Belanja Surat Kabar/Majalah				13.120.000	APBD			
1	04	01	06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diperpanjang Izin dan Pajak Kendaraan	Kota Bima	3 Unit	18.300.000	APBD		3 Unit	18.300.000
1	04	01	06	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				18.300.000	APBD			
1	04	01	06	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				10.200.000	APBD			
1	04	01	06	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				10.200.000	APBD			
1	04	01	06	5.2.2	05		Belanja Perawatan				8.100.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
							Kendaraan Bermotor								
1	04	01	06	5.2.2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor			4.700.000	APBD				
1	04	01	06	5.2.2	05	07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			3.400.000	APBD				
1	04	01	07				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Cakupan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Bima	12 Bln	52.850.600	APBD	12 Bln	52.850.600	
1	04	01	07	5.2.1			Belanja Pegawai			52.200.000	APBD				
1	04	01	07	5.2.1	01		Honorarium PNS			52.200.000	APBD				
1	04	01	07	5.2.1	01	06	Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan			52.200.000	APBD				
1	04	01	07	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			650.600	APBD				
1	04	01	07	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			400.600	APBD				
1	04	01	07	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor			400.600	APBD				
1	04	01	07	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan			250.000	APBD				
1	04	01	07	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan			250.000	APBD				
1	04	01	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	Kota Bima	12 Bln	20.400.000	APBD	12 Bln	20.400.000	
1	04	01	08	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			20.400.000	APBD				
1	04	01	08	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor			20.400.000	APBD				
1	04	01	08	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai			20.400.000	APBD				
1	04	01	10				Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan ketersediaan ATK	Kota Bima	12 Bln	53.208.400	APBD	12 Bln	53.208.400	
1	04	01	10	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			53.208.400	APBD				
1	04	01	10	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			53.208.400	APBD				
1	04	01	10	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor			43.208.400	APBD				
1	04	01	10	5.2.2	01	04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			10.000.000	APBD				
1	04	01	11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Penyediaan Barang Cetak dan	Kota Bima	12 Bln	47.550.000	APBD	12 Bln	47.550.000	

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penggandaan								
1	04	01	11	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			47.550.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			10.000.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho			10.000.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan			37.550.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	06	01	Belanja Cetak			2.550.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan			25.000.000	APBD				
1	04	01	11	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan			10.000.000	APBD				
1	04	01	13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bima	10 Unit	70.750.000	APBD		10 Unit	70.750.000
1	04	01	13	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			5.000.000	APBD				
1	04	01	13	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			5.000.000	APBD				
1	04	01	13	5.2.2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih			5.000.000	APBD				
1	04	01	13	5.2.3			Belanja Modal			65.750.000	APBD				
1	04	01	13	5.2.3	29		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer			65.750.000	APBD				
1	04	01	13	5.2.3	29	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer			65.750.000	APBD				
1	04	01	17				Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan ketersediaan Makan dan Minum Kantor	Kota Bima	12 Bln	50.400.000	APBD		12 Bln	50.400.000
1	04	01	17	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			50.400.000	APBD				
1	04	01	17	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman			50.400.000	APBD				

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	01	17	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				14.400.000	APBD			
1	04	01	17	5.2.2	11	03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				36.000.000	APBD			
1	04	01	18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan keikutsertaan rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah	Kota Bima	12 Bln	490.000.000	APBD		12 Bln	490.000.000
1	04	01	18	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				490.000.000	APBD			
1	04	01	18	5.2.2	15		Belanja Perjalanan Dinas				490.000.000	APBD			
1	04	01	18	5.2.2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				490.000.000	APBD			
1	04	01	24				Pengelolaan PPID	Cakupan pelayanan informasi publik	Kota Bima	12 Bln	25.900.000	APBD		12 Bln	25.900.000
1	04	01	24	5.2.1			Belanja Pegawai				22.400.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.1	01		Honorarium PNS				22.400.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				22.400.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				3.500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				2.500.000	APBD			
1	04	01	24	5.2.2	11	04	Belanja makanan dan minuman Kegiatan				2.500.000	APBD			
1	04	02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Kota Bima	100%	86.520.000	APBD		100%	198.120.000
1	04	02	22				Pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung yang	Kota Bima	1 Bln	30.000.000	APBD		4 Bln	30.000.000

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kantor	dipelihara							
1	04	02	22	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			30.000.000	APBD				
1	04	02	22	5.2.2	20		Belanja Pemeliharaan			30.000.000	APBD				
1	04	02	22	5.2.2	20	05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			30.000.000	APBD				
1	04	02	24				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas berfungsi baik	Kota Bima	3 Bln	48.120.000	APBD	3 Bln	48.120.000	
1	04	02	24	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			48.120.000	APBD				
1	04	02	24	5.2.2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			48.120.000	APBD				
1	04	02	24	5.2.2	05	01	Belanja Jasa Service			22.500.000	APBD				
1	04	02	24	5.2.2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang			12.500.000	APBD				
1	04	02	24	5.2.2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas			13.120.000	APBD				
1	04	02	26				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Kota Bima	5 Bln	8.400.000	APBD	0 Bln	-	
1	04	02	26	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			8.400.000	APBD				
1	04	02	26	5.2.2	20		Belanja Pemeliharaan			8.400.000	APBD				
1	04	02	26	5.2.2	20	04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			8.400.000	APBD				
1	04	06					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kota Bima	100%	104.497.000	APBD	100%	175.897.000	
1	04	06	01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang harus disediakan	Kota Bima	4 Bln	13.266.000	APBD	4 Bln	13.266.000	
1	04	06	01	5.2.1			Belanja Pegawai			11.960.000	APBD				
1	04	06	01	5.2.1	01		Honorarium PNS			11.960.000	APBD				

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	06	01	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				11.960.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				1.306.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				756.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				756.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				550.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				300.000	APBD			
1	04	06	01	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				250.000	APBD			
1	04	06	03				Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis	Jumlah laporan yang harus disediakan	Kota Bima	1 Bln	8.798.000	APBD		1 Bln	8.798.000
1	04	06	03	5.2.1			Belanja Pegawai				8.070.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.1	01		Honorarium PNS				8.070.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				8.070.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				728.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				328.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				328.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				400.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				150.000	APBD			
1	04	06	03	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				250.000	APBD			
1	04	06	04				penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 Bln	15.503.000	APBD		1 Bln	15.503.000
1	04	06	04	5.2.1			Belanja Pegawai				13.360.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.1	01		Honorarium PNS				13.360.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				13.360.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				2.143.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				378.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				378.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	06	04	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				550.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				300.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				250.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				1.215.000	APBD			
1	04	06	04	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				1.215.000	APBD			
1	04	06	05				Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang harus tersedia	Kota Bima	4 Bln	41.154.000	APBD		4 Bln	41.154.000
1	04	06	05	5.2.1			Belanja Pegawai				35.340.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.1	01		Honorarium PNS				35.340.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				35.340.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				5.814.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				1.184.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				1.184.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				2.200.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				1.200.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				1.000.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				2.430.000	APBD			
1	04	06	05	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.430.000	APBD			
1	04	06	06				Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah laporan yang sesuai ketentuan	Kota Bima	2 Bln	25.776.000	APBD		2 Bln	25.776.000
1	04	06	06	5.2.1			Belanja Pegawai				23.920.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.1	01		Honorarium PNS				23.920.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				23.920.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	06	06	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				1.856.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				756.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				756.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				1.100.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				600.000	APBD			
1	04	06	06	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				500.000	APBD			
1	04	15					Program Pengembangan Perumahan	Porsentase rumah layak Huni (MBR)	Kota Bima	2,79%	5.248.505.300	APBD		1,67%	5.248.505.300
1	04	15	09				Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Jumlah rumah yang dilakukan pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Kota Bima	350 Bln	305.735.000	APBD		200 Bln	305.735.000
1	04	15	09	5.2.1			Belanja Pegawai				87.750.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.1	01		Honorarium PNS				87.750.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				87.750.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				217.985.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				28.224.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				13.000.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materiail Dan Benda Pos Lainnya				14.700.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho				524.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				108.200.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				108.200.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				4.800.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				4.800.000	APBD			
1	04	15	09	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/P				10.000.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
							arkir								
1	04	15	09	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan			10.000.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman			53.925.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			38.925.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	11	03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu			15.000.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu			3.600.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	14	05	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan			3.600.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur			9.236.000	APBD				
1	04	15	09	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur			9.236.000	APBD				
1	04	15	11				Pelaksanaan Pemuktahiran Data Perumahan	Jumlah data perumahan yang ter-update	Kota Bima	34.828 Bln	307.969.000	APBD	34.828 Bln	307.969.000	
1	04	15	11	5.2.1			Belanja Pegawai			24.000.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.1	01		Honorarium PNS			24.000.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			24.000.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa			283.969.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis			4.377.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor			3.607.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			246.000	APBD				
1	04	15	11	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho			524.000	APBD				

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	15	11	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				2.738.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.738.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				4.200.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				4.200.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				8.790.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				8.790.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	21		Belanja Jasa Konsultansi				254.000.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	21	05	Belanja Jasa Konsultansi Manajemen				254.000.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				9.864.000	APBD			
1	04	15	11	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				9.864.000	APBD			
1	04	15	12				Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah pendampingan rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas) di kawasan permukiman kumuh	Kota Bima	343 Bln	3.859.762.800	APBD		280 Bln	3.859.762.800
1	04	15	12	5.2.1			Belanja Pegawai				163.550.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.1	01		Honorarium PNS				163.550.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				155.750.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.1	01	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan				7.800.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jasa								
1	04	15	12	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				3.696.212.800	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				39.206.800	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				30.094.800	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				8.064.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho				1.048.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				155.700.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				155.700.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				7.808.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				7.808.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				2.800.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				2.800.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				57.480.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				42.480.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	11	03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				15.000.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	15		Belanja Perjalanan Dinas				26.562.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				26.562.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				13.920.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	17	02	Belanja Sosialisasi				13.920.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	28		Belanja Jasa				32.736.000	APBD			

Kode Rekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur								
1	04	15	12	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				32.736.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	32		Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				3.360.000.000	APBD			
1	04	15	12	5.2.2	32	01	Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				3.360.000.000	APBD			
1	04	15	15				Pengelolaan Perumahan Formal	Jumlah Hunian Perumahan Formal Terkelola	Kota Bima	78 Bln	775.038.500	APBD		0 Bln	775.038.500
1	04	15	15	5.2.1			Belanja Pegawai				61.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.1	01		Honorarium PNS				61.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				61.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				381.248.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				7.700.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				2.700.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				2.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				240.600.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	03	03	Belanja Listrik				108.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	03	06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit				20.400.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				112.200.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	15	15	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.500.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	06	03	Belanja Penjilidan				500.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				6.960.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				6.960.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	13		Belanja Pakaian Kerja				5.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	13	01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan				5.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	20		Belanja Pemeliharaan				104.500.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	20	06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				100.000.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	20	22	Belanja pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan				4.500.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				13.488.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				13.488.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.3			Belanja Modal				332.790.500	APBD			
1	04	15	15	5.2.3	27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor				176.650.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.3	27	05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya				176.650.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.3	28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan				20.512.500	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Alat Rumah Tangga								
1	04	15	15	5.2.3	28	01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair				20.512.500	APBD			
1	04	15	15	5.2.3	50		Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal				135.628.000	APBD			
1	04	15	15	5.2.3	50	08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun				135.628.000	APBD			
2	04	16					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Peningkatan luas lahan yang diadakan	Kota Bima	2,43%	5.360.932.000	APBD		3,53%	7.360.932.000
2	04	16	03				Pembebasan/Pengadaan Tanah	Luas tanah yang diadakan/dibebaskan	Kota Bima	50.000 Bln	5.221.432.000	APBD		72.758 Bln	7.221.432.000
2	04	16	03	5.2.1			Belanja Pegawai				53.850.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.1	01		Honorarium PNS				53.850.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				53.850.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				167.582.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				6.548.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.500.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho				1.048.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				9.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				9.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	06		Belanja Cetak dan				5.000.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penggandaan								
2	04	16	03	5.2.2	06	01	Belanja Cetak				3.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				21.600.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				21.600.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	21		Belanja Jasa Konsultansi				104.450.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				104.450.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				20.984.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				20.984.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.3			Belanja Modal				5.000.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.3	11		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung				5.000.000.000	APBD			
2	04	16	03	5.2.3	11	05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong				5.000.000.000	APBD			
1	04	16					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase peningkatan penanganan kawasan permukiman potensi kumuh	Kota Bima	100%	274.588.000	APBD		100%	274.588.000
1	04	16	04				Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Khusus, Strategis dan Skala Besar	luas penangan kawasan diluar deliniasi kumuh (Penghubung)	Kota Bima	12 Bln	274.588.000	APBD		6 Bln	274.588.000
1	04	16	04	5.2.1			Belanja Pegawai				36.000.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.1	01		Honorarium PNS				24.000.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	16	04	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				24.000.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.1	07		Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS				12.000.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.1	07	02	Uang Transport Peserta Non PNS				12.000.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				17.360.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				2.500.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.500.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				3.200.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				3.200.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.400.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				1.400.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				10.260.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				10.260.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.3			Belanja Modal				221.228.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.3	59		Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan				221.228.000	APBD			
1	04	16	04	5.2.3	59	04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa				221.228.000	APBD			
2	04	16	05				Sertifikasi Tanah Tanah Pemerintah	jumlah aset tanah Pemerintah Yang Bersertifikat	Kota Bima	92.448 Bln	139.500.000	APBD		50.000 Bln	139.500.000
2	04	16	05	5.2.1			Belanja Pegawai				54.750.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	04	16	05	5.2.1	01		Honorarium PNS				54.750.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				54.750.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				84.750.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				5.500.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.500.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				3.000.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				75.000.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	03	08	Belanja Sertifikasi				75.000.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.000.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				2.250.000	APBD				
2	04	16	05	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				2.250.000	APBD				
1	04	18					Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	persentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/ sosial yang ditangani	Kota Bima	0,06%	2.515.623.000	APBD		0,06%	2.515.623.000	
1	04	18	06				Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah rumah yang dibangun baru dan diperbaiki (peningkatan kualitas)	Kota Bima	200 Bln	2.515.623.000	APBD		100 Bln	2.515.623.000	
1	04	18	06	5.2.1			Belanja Pegawai				57.750.000	APBD				
1	04	18	06	5.2.1	01		Honorarium PNS				57.750.000	APBD				
1	04	18	06	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				57.750.000	APBD				
1	04	18	06	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				2.457.873.000	APBD				
1	04	18	06	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				5.184.000	APBD				
1	04	18	06	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				3.400.000	APBD				

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	18	06	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				1.260.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	01	10	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho				524.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				56.000.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				56.000.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				360.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				360.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.400.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan				1.400.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				5.625.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				5.625.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	23		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				2.378.600.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	23	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat				2.378.600.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				10.704.000	APBD			
1	04	18	06	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				10.704.000	APBD			
1	04	21					Program Perencanaan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh	Kota Bima	2,01%	294.198.000	APBD		1,33%	294.198.000

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04	21	01				Perencanaan Penanganan Kumuh Kota Bima	Luas Kawasan Kumuh yang dilakukan pendampingan dalam perencanaan	Kota Bima	25 Bln	294.198.000	APBD		17 Bln	294.198.000
1	04	21	01	5.2.1			Belanja Pegawai				90.750.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.1	01		Honorarium PNS				90.750.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				90.750.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				203.448.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				3.100.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.500.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				20.400.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				20.400.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.000.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	11		Belanja Makanan dan Minuman				30.720.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	11	02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				23.220.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	11	03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu				7.500.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	17		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				4.200.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	17	02	Belanja Sosialisasi				4.200.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	21		Belanja Jasa Konsultansi				115.300.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	21	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan				115.300.000	APBD			
1	04	21	01	5.2.2	28		Belanja Jasa				27.728.000	APBD			

KodeRekening							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur								
1	04	21	01	5.2.2	28	01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur				27.728.000	APBD			
1	04	22					Program Pengembangan Kawasan	Persentase peningkatan kawasan permukiman potensi kumuh	Kota Bima	100%	48.266.000	APBD		100%	48.266.000
1	04	22	02				Pengendalian Penangan Kawasan Permukiman	Jumlah Penerima Manfaat NSD	Kota Bima	78 Bln	48.266.000	APBD		50 Bln	48.266.000
1	04	22	02	5.2.1			Belanja Pegawai				21.600.000				
1	04	22	02	5.2.1	01		Honorarium PNS				15.600.000	APBD			
1	04	22	02	5.2.1	01	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				15.600.000				
1	04	22	02	5.2.1	07		Uang Saku dan Transport Peserta Non PNS				6.000.000				
1	04	22	02	5.2.1	07	02	Uang Transport Peserta Non PNS				6.000.000				
1	04	22	02	5.2.2			Belanja Barang dan Jasa				26.666.000				
1	04	22	02	5.2.2	01		Belanja Bahan Pakai Habis				3.050.000				
1	04	22	02	5.2.2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor				2.500.000				
1	04	22	02	5.2.2	01	04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				550.000				
1	04	22	02	5.2.2	03		Belanja Jasa Kantor				9.000.000				
1	04	22	02	5.2.2	03	12	Belanja Jasa Non Pegawai				9.000.000				
1	04	22	02	5.2.2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan				2.000.000				
1	04	22	02	5.2.2	06	02	Belanja Penggandaan				2.000.000				
1	04	22	02	5.2.2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				1.400.000				
1	04	22	02	5.2.2	07	03	Belanja Sewa Ruang				1.400.000				

KodeRekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rapat/Pertemuan							
1 04 22 02 5.2.2 11		Belanja Makanan dan Minuman			4.500.000				
1 04 22 02 5.2.2 11 02		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat			4.500.000				
1 04 22 02 5.2.2 28		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur			6.716.000				
1 04 22 02 5.2.2 28 01		Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Instruktur			6.716.000				
Jumlah Total Belanja Langsung					14.865.608.300				17.108.608.300

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun 2020 ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dan arah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara fungsional oleh masing-masing unit kerja dalam angka tercapainya tujuan dan sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran SKPD periode tahun 2020 tidak hanya ditentukan oleh akurat dan realistisnya penyusunan rencana kerja melainkan didukung oleh tekad dan semangat pengabdian semua ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yang akan melaksanakannya.

Disamping itu dalam melaksanakan semua rencana kerja di lapangan masih banyak muncul masalah, hambatan dan kendala yang perlu diantisipasi sebelumnya sehingga diperlukan kejelian dan kemampuan pelaksana dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian agar tercapai sasaran kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Demikian rencana kerja ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima semoga dapat dipahami, direalisasikan sebagaimana yang diharapkan oleh masing-masing unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima sesuai dengan fungsinya.

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Bima



DIDI FAHDIANSYAH, ST.,MT
Pembina (IV/a)
NIP. 19740910200210 1 001